KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-06548/D.07/PR.01.02/04/2026 Jakarta, 13 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Indeks Ekonomi Hijau Daerah Tahun 2025

Yth**.** (*Mohon lihat daftar terlampir*)
di tempat

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka terhadap implementasi pengendalian dan evaluasi capaian perencanaan pembangunan lingkup lingkungan hidup, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat tiga indikator lingkup lingkungan hidup dan perubahan iklim, yaitu: Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (indikator sasaran visi), Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Tahunan (indikator utama pembangunan), dan Indeks Ekonomi Hijau (indikator Prioritas Nasional sekaligus indikator utama pembangunan). Sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2024, pemerintah daerah wajib menyelaraskan muatan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045, termasuk mengintegrasikan ketiga indikator tersebut ke dalam dokumen RPJMD 2025-2029.;
2. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian PPN/ Bappenas menyusun laporan tahunan mengenai potensi capaian penurunan emisi GRK, intensitas emisi GRK, serta capaian Indeks Ekonomi Hijau nasional dan daerah. Laporan ini disusun berdasarkan data pelaksanaan aksi Pembangunan Rendah Karbon dan capaian indikator Indeks Ekonomi Hijau yang dihimpun dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Laporan tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan laporan kinerja pembangunan RPJMN, RKP, serta Lampiran Pidato Kenegaraan (Lampid) Tahun 2026.
3. Untuk itu, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menyampaikan laporan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan aksi Pembangunan Rendah Karbon pada Tahun Anggaran 2025 pada sektor: (i) kehutanan dan lahan gambut, (ii) pertanian, (iii) energi, (iv) transportasi, (v) pengelolaan limbah, serta didukung oleh sektor (vi) pesisir dan laut.
   b. Data dan capaian 15-16 indikator dalam Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2025.
4. Penyampaikan laporan dilakukan melalui pengisian pada platform Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (AKSARA) pada tautan https://pprk.bappenas.go.id/aksara/ paling lambat tanggal 1 Mei 2026.
5. Untuk informasi lebih lanjut, kami menugaskan Sdri. Novia (085249874481) sebagai narahubung.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Pangan, Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup

Leonardo A.A.T. Sambodo

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas (sebagai laporan);
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Lampiran Surat
Nomor : B-06548/D.07/PR.01.02/04/2026
Tanggal : 13 April 2026

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Gubernur Aceh;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Gubernur Riau;
5. Gubernur Jambi;
6. Gubernur Sumatera Selatan;
7. Gubernur Bengkulu;
8. Gubernur Lampung;
9. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
10. Gubernur Kepulauan Riau;
11. Gubernur DKI Jakarta;
12. Gubernur Jawa Barat;
13. Gubernur Jawa Tengah;
14. Gubernur DI Yogyakarta;
15. Gubernur Jawa Timur;
16. Gubernur Banten;
17. Gubernur Bali;
18. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
19. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
20. Gubernur Kalimantan Barat;
21. Gubernur Kalimantan Tengah;
22. Gubernur Kalimantan Selatan;
23. Gubernur Kalimantan Timur;
24. Gubernur Kalimantan Utara;
25. Gubernur Sulawesi Utara;
26. Gubernur Sulawesi Tengah;
27. Gubernur Sulawesi Selatan;
28. Gubernur Sulawesi Tenggara;
29. Gubernur Gorontalo;
30. Gubernur Sulawesi Barat;
31. Gubernur Maluku;
32. Gubernur Maluku Utara;
33. Gubernur Papua Barat;
34. Gubernur Papua Barat Daya;
35. Gubernur Papua;
36. Gubernur Papua Selatan;
37. Gubernur Papua Tengah;
38. Gubernur Papua Pegunungan

Sekretaris Daerah

39. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh
40. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
41. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
42. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
43. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
44. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
45. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
46. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
47. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
48. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
49. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
50. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
51. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
52. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
53. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
54. Sekretaris Daerah Provinsi Banten

55. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
56. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
57. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
58. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
59. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
60. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
61. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
62. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
63. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
64. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
65. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
66. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
67. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
68. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
69. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
70. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
71. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
72. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
73. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
74. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan;
75. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
76. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

77. Kepala Bappeda Provinsi Aceh
78. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara
79. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
80. Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau
81. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
82. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
83. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
84. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
85. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
86. Kepala Bappenlitbang Provinsi Kepulauan Riau
87. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
88. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
89. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah
90. Kepala Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
91. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur
92. Kepala Bappeda Provinsi Banten
93. Kepala Bappeda Provinsi Bali
94. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
95. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
96. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
97. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
98. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
99. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
100. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
101. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
102. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
103. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
104. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
105. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
106. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat
107. Kepala Bappeda Provinsi Maluku
108. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara
109. Kepala Bappeda Provinsi Papua
110. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat
111. Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan
112. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah
113. Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Achmad Ardiansyah, S.TP, M.A.P	Sekretaris Badan	Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
4.	Nila Desmini Indriani, S.E., M.Ec.Dev	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Perencanan, Penelitian dan Pengembangan dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Perencanan, Penelitian dan Pengembangan
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Achmad Ardiansyah, S.TP, M.A.P)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Nila Desmini Indriani, S.E., M.Ec.Dev)

LAMPIRAN I : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2027

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	KET
1					2	3	4	6	9	10	11		12
5	**01**				**PERENCANAAN**				**35,457,153,370.94**	**35,584,050,217.25**			
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**79.48**	**28,672,435,716.14**	**28,902,983,554.25**			
						Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	**Indeks**	**91.50**					
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**A**					
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**375,000,000.00**	**350,000,000.00**			
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	150,000,000.00	150,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	75,000,000.00	75,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	50,000,000.00	50,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.01	0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	1	100,000,000.00	75,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**24,370,155,728.14**	**25,300,185,256.04**			
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	128	23,696,835,728.14	24,611,865,256.04	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	613,320,000.00	613,320,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20,000,000.00	25,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	20,000,000.00	25,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	20,000,000.00	25,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**350,000,000.00**	**200,000,000.00**			
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	150,000,000.00	0	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	KET
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,567,552,112.00**	**1,621,922,186.21**			
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	60,000,000.00	70,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	80,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	150,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	150,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	80,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	822,552,112.00	901,922,186.21	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	75,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50,000,000.00	50,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**455,000,000.00**	**200,000,000.00**			
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3	105,000,000.00	0	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Paket	1	200,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	150,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**580,876,112.00**	**580,876,112.00**	**Provinsi Kepulauan Riau**		
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	20,000,000.00	20,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	242,000,000.00	242,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	218,876,112.00	218,876,112.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	KET
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**973,851,764.00**	**650,000,000.00**			
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	155,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	550,000,000.00	350,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	100,000,000.00	150,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	168,851,764.00	50,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah**	**Persen**	**80**	**3,177,327,000.00**	**2,325,000,000.00**			
						Persentase Capaian Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi pada RKPD	**Persen**	**75.51**					
						Persentase Tingkat Penurunan Nilai RisikoDaerah (Residual risk) melalui Penerapan Menejemen Risiko	**Persen**	**11.9**					
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				**2,150,000,000.00**	**1,350,000,000.00**			
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	150,000,000.00	0	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	175,000,000.00	175,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	2	175,000,000.00	175,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2	450,000,000.00	500,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	1,200,000,000.00	500,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**227,327,000.00**	**175,000,000.00**			
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	77,327,000.00	75,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	50	150,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**800,000,000.00**	**800,000,000.00**			

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	KET
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	10	450,000,000.00	450,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	100,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	Laporan	14	250,000,000.00	250,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	1	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	85.71	3,607,390,654.80	4,356,066,663.00			
						Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	47.44					
						Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	81.93					
						Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	70.59					
						Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100					
						Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	48.33					
						Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	20.34					
						Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	30					
						Persentase Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan KUA PPAS Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100					
						Rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	46.5					
						Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN pada Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	52					
						Persentase Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	100					
5	01	03	1.01		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1,227,450,409.80	1,411,323,780.00			

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	KET
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	162,745,041.00	172,901,156.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	135,294,049.00	194,773,876.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	162,745,041.00	172,901,156.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	202,941,073.80	260,392,036.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	563,725,205.00	610,355,556.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**1,161,304,245.00**	**1,375,138,190.00**			
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	261,304,245.00	320,987,966.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	225,000,000.00	263,537,556.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	225,000,000.00	263,537,556.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	225,000,000.00	263,537,556.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	225,000,000.00	263,537,556.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				**1,218,636,000.00**	**1,569,604,693.00**			
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	275,000,000.00	402,075,112.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidan Infrastruktur	Laporan	1	200,000,000.00	302,075,112.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	268,636,000.00	363,379,357.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	KET
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	275,000,000.00	402,075,112.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	200,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan**	**persen**	**85**	**1,200,000,000.00**	**1,200,000,000.00**			
						Persentase Inovasi yang dilaporkan	**persen**	**80**					
						Jumlah Diseminasi Hasil Kelitbangan	**Karya**	**20**					
5	**05**	**02**	**1.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**				**650,000,000.00**	**650,000,000.00**			
5	05	02	1.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	250,000,000.00	250,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	05	02	1.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	250,000,000.00	250,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	1	150,000,000.00	150,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**				**150,000,000.00**	**150,000,000.00**			
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	150,000,000.00	150,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**				**150,000,000.00**	**150,000,000.00**			
5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	150,000,000.00	150,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**				**250,000,000.00**	**250,000,000.00**			
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	250,000,000.00	250,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	
5	**05**	**03**			**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase naskah kebijakan berbasis hasil riset yang direkomendasikan dalam Dokumen Perencanaan**	**persen**	**100**	**150,000,000.00**	**100,000,000.00**			
5	**05**	**03**	**1.01**		**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**				**150,000,000.00**	**100,000,000.00**			
5	05	03	1.01	0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Nakash	1	150,000,000.00	100,000,000.00	Provinsi Kepulauan Riau	Bappeda	

B. USULAN MASYARAKAT

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

C. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

-

LAMPIRAN II : USULAN YANG BELUM DAPAT DIAKOMODIR

No	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Lokasi	Alasan Ditolak
-	-	-	-	-	-

-

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M	Kepala Badan	Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Kepegawaian Daerah dan KORPRI dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Inspektorat Daerah**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Drs. Adi Prihantara, M.M	Plt. Inspektur	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
4.	Mukhtar Hakim R, S.E., M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Inspaktorat Daerah dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Inspektorat Daerah
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Drs. Adi Prihantara, M.M)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Mukhtar Hakim R, S.E., M.Si)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Drs. Muhamad Iksan, M.Si	Kepala Badan	Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
4.	Mukhtar Hakim R, S.E., M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Drs. Muhamad Iksan, M.Si)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Mukhtar Hakim R, S.E., M.Si)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Satuan Polisi Pamong Praja dan Penangulangan Kebakaran**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Guntur Sakti, S.Sos., M.Si	Kepala	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penangulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penangulangan Kebakaran dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penangulangan Kebakaran
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Guntur Sakti, S.Sos., M.Si)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Kebudayaan**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Herry Andrianto, S.E., M.M	Kepala Dinas	Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
4.	Mukhtar Hakim R, S.E., M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dipindai dengan CamScanner

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Kebudayaan dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Kebudayaan
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Herry Andrianto, S.E., M.M)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Mukhtar Hakim R, S.E., M.Si)

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Pendidikan**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Dr. Andi Agung, S.E., M.M	Kepala Dinas	Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
4.	Nila Desmini Indriani, S.E., M.Ec.Dev	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Pendidikan dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Pendidikan
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Dr. Andi Agung, S.E., M.M)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Nila Desmini Indriani, S.E., M.Ec.Dev)

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Dr. Darson S.Pd., M.Si	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4.	Bachtiar	Sekretaris	Bappeda Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Dr. Darson S.Pd., M.Si)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bachtiar)

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Perpustakaan dan Arsip**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Dr. Moh Bisri, S.K.M., M.Si	Kepala Dinas	Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Riau
4.	Nila Desmini Indriani S.E., M.Ec.Dev	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Batam

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Perpustakaan dan Arsip
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Dr. Moh Bisri, S.K.M., M.Si)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Nila Desmini Indriani S.E., M.Ec.Dev)

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Badan Penghubung**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Sentot Faisal, S.IP., M.M	Kepala Badan	Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Sentot Faisal, S.IP., M.M)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Badan Penghubung**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Sentot Faisal, S.IP., M.M	Kepala Badan	Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Sentot Faisal, S.IP., M.M)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Badan Penghubung**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Sentot Faisal, S.IP., M.M	Kepala Badan	Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Sentot Faisal, S.IP., M.M)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

LAMPIRAN I : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2027

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.988.274.791	20.988.274.791			
	PENGHUBUNG DAERAH				16.075.135.614	15.575.135.615			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B					
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	62,52					
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,01					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	3	543.449.921	543.449.921	DKI Jakarta		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	97.405.553	97.405.553	DKI Jakarta		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1	275.201.761	275.201.761	DKI Jakarta		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Laporan	1	84.655.897	84.655.897	DKI Jakarta		

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Laporan	1	86.186.711	86.186.711	DKI Jakarta		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Terpenuhi Hak Keuangannya	Persentase	100	7.237.728.443	7.237.728.443	DKI Jakarta		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	45	6.885.494.184	6.885.494.184	DKI Jakarta		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	194.511.600	194.511.600	DKI Jakarta		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	157.722.659	157.722.659	DKI Jakarta		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah SPPD	Dokumen	1	50.000.000	50.000.000	DKI Jakarta		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	50.000.000	50.000.000	DKI Jakarta		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Persentase	100	167.756.476	167.756.476	DKI Jakarta		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	106.556.476	106.556.476	DKI Jakarta		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	61.200.000	61.200.000	DKI Jakarta		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Persentase	100	1.161.989.897	1.161.989.897	DKI Jakarta		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	450.000.000	450.000.000	DKI Jakarta		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	200.000.000	200.000.000	DKI Jakarta		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	125.000.000	125.000.000	DKI Jakarta		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	100.000.000	100.000.000	DKI Jakarta		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	286.989.897	286.989.897	DKI Jakarta		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Yang di Adakan	Jumlah	3	1.681.591.458	925.000.000	DKI Jakarta		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	931.591.458	350.000.000	DKI Jakarta		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	550.000.000	75.000.000	DKI Jakarta		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	500.000.000	DKI Jakarta		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan	Bulan	12	2.513.964.511	2.641.989.832	DKI Jakarta		
	Penyediaan Jasa	Jumlah	Laporan	12	1.013.281.987	1.013.281.987	DKI Jakarta		

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	220.429.321	220.429.321	DKI Jakarta			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.280.253.204	1.408.278.524	DKI Jakarta			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	Persentase	90	2.718.654.908	3.177.221.046	DKI Jakarta			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	1.823.399.449	1.857.399.449	DKI Jakarta			
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		30.000.000	30.000.000	DKI Jakarta			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	365.255.459	365.255.459	DKI Jakarta			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	500.000.000	924.566.138	DKI Jakarta			
Program Pelayanan Penghubung	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani	Persentase	100	4.913.139.177	5.413.139.177	DKI Jakarta			
	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase	100			DKI Jakarta			

	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah	Persentase	100			DKI Jakarta		
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Badan Penghubung	Dokumen	1	4.913.139.177	5.413.139.177	DKI Jakarta		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	1	2.009.864.694	2.009.864.694	DKI Jakarta		
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	1	717.370.906	1.217.370.906	DKI Jakarta		
Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	1	895.089.110	895.089.110	DKI Jakarta		
Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	1	251.859.010	251.859.010	DKI Jakarta		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	1	1.038.955.458	1.038.955.458	DKI Jakarta		

B. Usulan Masyarakat :

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
1						

C. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

(terlampir sebagaimana yang telah diinput pada SIPD)

LAMPIRAN II : Usulan yang Belum Dapat Diakomodir

No	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Lokasi	Alasan Ditolak
1					

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Misbardi, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Misbardi, S.Sos., M.Si)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Misbardi, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Misbardi, S.Sos., M.Si)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Misbardi, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Misbardi, S.Sos., M.Si)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

LAMPIRAN I : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2027

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**1.070.000.000,00**	**1.270.000.000,00**			
I	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**	**%**	**99,78**	**465.000.000,00**	**540.000.000,00**			
		Persentase Kepemilikan KTP-el	**%**	**64**					
1	**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)**	**Laporan**	**1**	**465.000.000,00**	**405.000.000,00**			
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	**Laporan**	**1**					
1.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	185.000.000,00	190.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.2	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	145.000.000,00	215.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
2	**Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk**	**Laporan**	**1**	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**			
2.1	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	135.000.000,00	135.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
II	**Program Pencatatan sipil**	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan**	**%**	**100**	**300.000.000,00**	**390.000.000,00**			
		Persentase Akta Kelahiran Yang	**%**	**100**					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan							
1	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten /Kota**	**Laporan**	**1**	**165.000.000,00**	**255.000.000,00**			
1.1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten /Kota	Laporan	1	165.000.000,00	255.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
2	**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil**	**Laporan**	**1**	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**			
2.1	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	135.000.000,00	135.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
III	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi**	**%**	**40,91**	**295.000.000,00**	**315.000.000,00**			
1	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan**	**Laporan**	**1**	**295.000.000,00**	**315.000.000,00**			
1.1	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1	295.000.000,00	315.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
IV	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun**	**%**	**100**	**10.000.000,00**	**25.000.000,00**			
1	**Penyediaan Profil Kependudukan**	**Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Dokumen)**	**Dokumen**	**2**	**10.000.000,00**	**25.000.000,00**			
1.1	Penyediaan data kependudukan provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	2	10.000.000,00	25.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
B	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**15.678.322.340,87**	**16.534.692.804,00**			
I	**Program Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang telah ditata kelembagaan Desanya sesuai standar**	**Desa**	**15**	**120.000.000,00**	**170.000.000,00**			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Dokumen)**	**Dokumen**	**1**	**120.000.000,00**	**170.000.000,00**			
1.1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	1	120.000.000,00	170.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
II	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase Desa Yang Difasilitasi Kerjasamanya**	**%**	**54,18**	**195.000.000,00**	**285.500.000,00**			
1	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan**	Dokumen	**1**	**195.000.000,00**	**285.500.000,00**			
		jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	**Dokumen**	**1**					
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	**Dokumen**	**1**					
1.1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	75.000.000,00	125.500.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Dokumen	1	75.000.000,00	75.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	45.000.000,00	85.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
III	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**%**	**51,03**	**435.000.000,00**	**655.500.000,00**			
1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina**	**Orang**	**80**	**435.000.000,00**	**655.500.000,00**			
		Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	**Orang**	**80**					
		Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	**Dokumen**	**1**					
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan	**Dokumen**	**1**					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	**Dokumen**	**1**					
1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	100.000.000,00	203.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.2	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	80	95.000.000,00	155.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	80	100.000.000,00	100.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.4	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	55.000.000,00	85.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.5	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	85.000.000,00	112.500.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
IV	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Pesentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Yang Sudah Dibina**	**%**	**16,55**	**1.530.000.000,00**	**2.025.000.000,00**			
1	**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya**	**Lembaga**	**5**	**1.530.000.000,00**	**2.025.000.000,00**			
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	**Laporan**	**1**					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	**Dokumen**	**1**					
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	**Dokumen**	**1**					
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	**Laporan**	**1**					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	**Unit**	**2**					
1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Mayarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	85.000.000,00	125.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Lembaga	5	95.000.000,00	95.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya							
1.3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	2	30.000.000,00	30.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	150.000.000,00	255.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	120.000.000,00	220.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1.050.000.000,00	1.300.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
V	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**Indeks**	**93**	**13.398.322.340,87**	**13.398.692.804,00**			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**89,15**					
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**BB**					
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**	**163.500.000,00**	**163.500.000,00**			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan**	**1**					
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	**Laporan**	**4**					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	42.200.000,00	42.200.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.2	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	45.500.000,00	45.500.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	75.800.000,00	75.800.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Orang/ Bulan**	**72**	**11.473.322.340,87**	**11.473.692.804,00**			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan**	**1**					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Dokumen**	**1**					
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	68	10.963.473.816,87	10.963.844.280,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	484.848.524,00	484.848.524,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	15.000.000,00	25.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Laporan**	**1**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**			
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000,00	15.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**Orang**	**5**	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	**Paket**	**1**					
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	68.000.000,00	68.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
4.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	38.000.000,00	15.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	**737.500.000,00**	**737.500.000,00**			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2					
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.500.000,00	6.500.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	130.000.000,00	130.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	36.000.000,00	36.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	50.000.000,00	50.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	15.000.000,00	15.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	500.000.000,00	500.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	**430.000.000,00**	**430.000.000,00**			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10					
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10					
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1					
6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	45.000.000,00	45.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
6.3	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	150.000.000,00	150.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	235.000.000,00	160.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**Laporan**	**1**	**258.000.000,00**	**258.000.000,00**			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Laporan**	**1**					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Laporan**	**2**					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Laporan**	**1**					
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000,00	5.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000,00	50.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	2	35.000.000,00	35.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	168.000.000,00	168.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
8	Pemeliharaan Barang Milik **Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15					
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	180.000.000,00	180.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	35.000.000,00	35.000.000,00	Prov. Kepri	Dpmd Dukcapil	

B. Usulan Masyarakat:

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
1	AMAN, S.Pd., MM	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Perum. Taman Marchelia RW009 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam	-	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah dilampirkan
2	Ketua Koperasi PKK Meranti 3 Kota Tanjungpinang	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Jln. Brigjen Katamso Gg. Meranti RT 003 RW 001 Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang	40.900.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah dilampirkan
3	Ketua Posyandu Maisarah Kel. Batu IX Kota Tanjungpinang	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	RT 03/RW 014 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang	13.500.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah dilampirkan
4	Ketua RT 001 / RW 003 Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan	Perum. Bukita Indah Lestari Jln. Wonoyoso RT 001 / RW 003	69.100.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Proposal sudah dilampirkan

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
		Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang		Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
5	Ketua Posyandu Tulip Kel. Pinang Kencana Kota Tanjungpinang	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Jln. Dirgantara RW 006 Perumahan Bintan Permai Kelurahan Pinang Kencana Kota Tanjungpinang	30.450.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah dilampirkan
6	Ketua Posyandu Janur Kuning Kel. Seijang Kota Tanjungpinang	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Posyandu Janur Jln Perintis RT 001 RW 001 Kuning Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	35.700.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah dilampirkan
7	Ketua Posyandu Mutiara Hati Kel. Kampung Baru Kota Tanjungpinang	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Posyandu Mutiara Hati Jl. Wiratno Gg. Logistik Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang	21.750.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah dilampirkan

C. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

(terlampir sebagaimana yang telah diinput pada SIPD)

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
1	RUDY CHUA, SE, MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau	7.500.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
2	Hj. ROHANI, S.AP	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Dusun II Desa Gemuruh Kec. Kundur Barat, Provinsi Kepulauan Riau	5.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
3	AMAN, S.Pd., MM	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Tanjung Buntung Bengkong , Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
4	RUDY CHUA, SE, MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Kampung Bugis RT 003 RW 001 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Proposal sudah diinput d SIPD

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
					Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
5	RUDY CHUA, SE, MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Jl Sultan Machmud Gg Sei Payung II No 42 RT 002 RW 006 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
6	RUDY CHUA, SE, MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Jl Sultan Machmud Gg Beluntas II RT 004 RW 006 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
7	RUDY CHUA, SE, MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Jl Ir Sutami Gg Sukaberenang II RT 001 RW 005 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
8	RUDY CHUA, SE, MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Kp Mekar Jaya RT 001 RW 001 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
9	RUDY CHUA, SE, MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Jl Abdul Rahman RT 001 RW 001 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
10	RUDY CHUA, SE, MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	KP Wonoyoso RT 001 RW 003 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
11	RUDY CHUA, SE, MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Jl Sultan Sulaiman Kp Bulang RT 002 RW 010 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
12	MUHAMMAD NAJIB	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Perum Lobam Mas Asri RT.002 RW.004, Kel. Tanjung Permai, Kec. Seri Kuala Lobam, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
13	Hj. MESRAWATI TAMPUBOLON, SE., MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Bengkong Kolam Mas RT 001 RW 019 Kel Sadai Kec Bengkong, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
14	Hj. MESRAWATI TAMPUBOLON, SE., MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Sei Tering Melchem RT 001 RW 019 Kel Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
15	Capt. LUTHER JANSEN, M.Mar., MM	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	RT003/RW003 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	10.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
16	Hj. MESRAWATI TAMPUBOLON, SE., MH	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Sei Nayon RT 001 RW 012 Kel Sadai Kec Bengkong, Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
17	WAHYU WAHYUDIN, A.Md	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Perumahan Buana Garden RW 012 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sei Beduk , Provinsi Kepulauan Riau	5.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Proposal sudah diinput d SIPD
18	Drs. KHAZALIK	Kurangnya komitmen Pemerintahan Desa dalam pengembangan BUMDesa sebagai sentra pengembangan ekonomi di desa	Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep , Provinsi Kepulauan Riau	15.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Proposal sudah diinput d SIPD

LAMPIRAN II : Usulan yang Belum Dapat Diakomodir

No	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Lokasi	Alasan Ditolak
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam	Minimya sarana pendukung dan minimnya sosialisasi/ publikasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	- Sarana Pelayanan: Notebook/ laptop dan Anjungan Dukcapil Mandiri; - Layar Interaktif Sedang	Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Terbatasnya alokasi anggaran tahun 2027
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun	Minimya sarana pendukung dan minimnya sosialisasi/ publikasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun	- Pengadaan alat perekam, pengadaan jaringan komunikasi data, pengadaan peralatan cetak data kependudukan dan catatan sipil - Pengadaan mobil keliling	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun	Terbatasnya alokasi anggaran tahun 2027
	Dra. HJ. DEWI KUMALASARI, M.Pd	Bantuan Tenda, Kursi, Alat Prasmanan	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi seluruh Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan	Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Proposal ditujukan kepada Bupati Bintan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib & Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud)**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Dr. Yosei Susanti, M.A.P	Plt. Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
4.	Dr. Bambang Utoyo, M.A.P	Direktur	RSUD Raja Ahmad Tabib
5.	Nila Desmini Indriani S.E., M.Ec.Dev	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Batam

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib & Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud) dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Kesehatan
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Dr. Yosei Susanti, M.A.P)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Nila Desmini Indriani S.E., M.Ec.Dev)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib & Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud)**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Dr. Yosei Susanti, M.A.P	Plt. Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
4.	Dr. Bambang Utoyo, M.A.P	Direktur	RSUD Raja Ahmad Tabib
5.	Nila Desmini Indriani S.E., M.Ec.Dev	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Batam

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib & Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud) dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Kesehatan
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Dr. Yosei Susanti, M.A.P)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Nila Desmini Indriani S.E., M.Ec.Dev)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib & Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud)**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Dr. Yosei Susanti, M.A.P	Plt. Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
4.	Dr. Bambang Utoyo, M.A.P	Direktur	RSUD Raja Ahmad Tabib
5.	Nila Desmini Indriani S.E., M.Ec.Dev	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Batam

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Thabib & Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud) dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Kesehatan
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Dr. Yosei Susanti, M.A.P)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Nila Desmini Indriani S.E., M.Ec.Dev)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Sosial**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Dr. Mahadi Rahman, SQ., M.Pd	Kepala Dinas	Dinas Sosial Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Dr. Mahadi Rahman, SQ., M.Pd)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Sosial**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Dr. Mahadi Rahman, SQ., M.Pd	Kepala Dinas	Dinas Sosial Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Dr. Mahadi Rahman, SQ., M.Pd)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Sosial**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Dr. Mahadi Rahman, SQ., M.Pd	Kepala Dinas	Dinas Sosial Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Dr. Mahadi Rahman, SQ., M.Pd)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

LAMPIRAN I : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2027

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNIT DINAS SOSIAL				**18.537.849.560**	**21.447.849.560**			
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi**	**%**	**0,13**	**1.889.985.133**	**3.271.385.133**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	**Penanganan Kemiskinan, Stunting**
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	**%**	**3,22**					
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	**%**	**100,00**					
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**				**1.889.985.133**	**3.271.385.133**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	**Penanganan Kemiskinan, Stunting**
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	KK	130	523.600.000	1.236.514.867	Prov. Kepri		
			KK	17			Tanjungpinang		
			KK	10			Bintan		
			KK	66			Batam		
			KK	17			Karimun		
			KK	10			Lingga		
			KK	5			Natuna		
			KK	5			Anambas		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.05.1.02.06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	org	2.040	495.285.133	1.163.770.266	Prov. Kepri		
			KK	269			Tanjungpinang		
			KK	158			Bintan		
			KK	1.043			Batam		
			KK	274			Karimun		
			KK	163			Lingga		
			KK	80			Natuna		
			KK	53			Anambas		
1.06.05.1.02.08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	7	871.100.000	871.100.000	Prov. Kepri		Honorarium Kelompok Kerja DTKS, Fasilitasi rapat koordinasi pengelolaan data kemiskinan bersama Dinsos Kab/Kota, Pengembangan Aplikasi SIKS KEPRI
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial**	**%**	**2,38**	**1.070.600.000**	**1.990.200.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	**%**	**42,35**					
		Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	**%**	**100,00**					
1.06.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**				**25.000.000**	**25.000.000**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	
1.06.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dok	1	25.000.000	25.000.000	Tanjungpinang		
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**				**1.045.600.000**	**1.965.200.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	lbg	8	300.000.000	480.000.000	Prov. Kepri		
			lbg	2			Tanjungpinang		
			lbg	2			Bintan		
			lbg	2			Batam		
			lbg	1			Karimun		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			lbg	1			Lingga		
			lbg				Natuna		
			lbg				Anambas		
1.06.02.1.02.08	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	org	108	100.000.000	320.000.000	Prov. Kepri		
			org	4			Tanjungpinang		
			org	38			Bintan		
			org	12			Batam		
			org	14			Karimun		
			org	13			Lingga		
			org	17			Natuna		
			org	10			Anambas		
1.06.02.1.02.11	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	org	1.250	645.600.000	1.165.200.000	Tanjungpinang		
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	**%**	**100,00**	**392.000.000**	**784.000.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	**Pemenuhan SPM Bidang Sosial**
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**				**392.000.000**	**784.000.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	**Pemenuhan SPM Bidang Sosial**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	org	100	180.000.000	360.000.000	Prov. Kepri		
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	org	100	25.000.000	50.000.000	Prov. Kepri		
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	org	100	112.000.000	224.000.000	Prov. Kepri		
1.06.06.1.01.11	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	org	100	50.000.000	100.000.000	Prov. Kepri		
1.06.06.1.01.13	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	org	20	15.000.000	30.000.000	Prov. Kepri		
1.06.06.1.01.17	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	org	100	10.000.000	20.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**%**	**100,00**	**1.160.000.000**	**1.377.000.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	**Pemenuhan SPM Bidang Sosial**
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**%**	**100,00**					
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**%**	**100,00**					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**%**	**100,00**					
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**%**	**100,00**					
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**				**191.000.000**	**256.000.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	**Pemenuhan SPM Bidang Sosial**
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	65	45.000.000	90.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	65	20.000.000	40.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	65	5.000.000	5.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	org	12	18.000.000	18.000.000	Batam		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org	65	8.000.000	8.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	65	25.000.000	25.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	org	65	25.000.000	25.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	org	1	5.000.000	5.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	org	1	5.000.000	5.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.17	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Batam		
1.06.04.1.01.21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	dok	1	25.000.000	25.000.000	Batam		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**				**597.000.000**	**689.000.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	**Pemenuhan SPM Bidang Sosial**
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	org	5	10.000.000	10.000.000	Tanjungpinang		
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	310	300.000.000	300.000.000	Prov. Kepri		
			org	62			Tanjungpinang		
			org	62			Bintan		
			org	62			Batam		
			org	62			Karimun		
			org	62			Lingga		
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org	310	25.000.000	25.000.000	Prov. Kepri		
			org	62			Tanjungpinang		
			org	62			Bintan		
			org	62			Batam		
			org	62			Karimun		
			org	62			Lingga		
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	310	60.000.000	60.000.000	Prov. Kepri		
			org	62			Tanjungpinang		
			org	62			Bintan		
			org	62			Batam		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			org	62			Karimun		
			org	62			Lingga		
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	org	310	60.000.000	60.000.000	Prov. Kepri		
			org	62			Tanjungpinang		
			org	62			Bintan		
			org	62			Batam		
			org	62			Karimun		
			org	62			Lingga		
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.02.15	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	310	92.000.000	184.000.000	Prov. Kepri		
			org	62			Tanjungpinang		
			org	62			Bintan		
			org	62			Batam		
			org	62			Karimun		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			org	62			Lingga		
1.06.04.1.02.17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	dok	1	25.000.000	25.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.02.22	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	org	10	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.02.23	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti**	**org**	**103**	**201.000.000**	**261.000.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	**Pemenuhan SPM Bidang Sosial**
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	103	30.000.000	60.000.000	Prov. Kepri		
			org	13			Tanjungpinang		
			org	36			Bintan		
			org	39			Batam		
			org	15			Lingga		
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	103	30.000.000	60.000.000	Prov. Kepri		
			org	13			Tanjungpinang		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			org	36			Bintan		
			org	39			Batam		
			org	15			Lingga		
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	103	10.000.000	10.000.000	Prov. Kepri		
			org	13			Tanjungpinang		
			org	36			Bintan		
			org	39			Batam		
			org	15			Lingga		
1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	org	4	16.000.000	16.000.000	Prov. Kepri		
			org	2			Tanjungpinang		
			org	2			Bintan		
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org	103	16.000.000	16.000.000	Prov. Kepri		
			org	13			Tanjungpinang		
			org	36			Bintan		
			org	39			Batam		
			org	15			Lingga		
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	103	22.000.000	22.000.000	Prov. Kepri		
			org	13			Tanjungpinang		
			org	36			Bintan		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			org	39			Batam		
			org	15			Lingga		
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	org	103	22.000.000	22.000.000	Prov. Kepri		
			org	13			Tanjungpinang		
			org	36			Bintan		
			org	39			Batam		
			org	15			Lingga		
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	org	2	10.000.000	10.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.03.15	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.03.16	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org	3	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.03.17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar Kewenangan Provinsi	dok	1	25.000.000	25.000.000	Tanjungpinang		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**				**96.000.000**	**96.000.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	**Pemenuhan SPM Bidang Sosial**
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	10	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	10	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	10	5.000.000	5.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org	10	2.000.000	2.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	10	10.000.000	10.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	org	10	10.000.000	10.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	org	10	10.000.000	10.000.000	Prov. Kepri		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.1.04.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org	1	2.000.000	2.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	org	10	20.000.000	20.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	dok	1	25.000.000	25.000.000	Tanjungpinang		
1.06.04.1.04.13	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	org	1	2.000.000	2.000.000	Prov. Kepri		
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**	**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA, yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti**	**org**	**25**	**75.000.000**	**75.000.000**	**Prov. Kepri**	**Dinas Sosial**	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	25	50.000.000	50.000.000	Prov. Kepri		
			org	15			Tanjungpinang		
			org	10			Bintan		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	dok	1	25.000.000	25.000.000	Tanjungpinang		
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	**%**	**11,11**	**25.000.000**	**25.000.000**	**Bintan**	**Dinas Sosial**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**				**25.000.000**	**25.000.000**	**Bintan**	**Dinas Sosial**	
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	makam	1	25.000.000	25.000.000	Bintan		
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**BB**	**14.000.264.427**	**14.000.264.427**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah		**83,30**					
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**450.000.000**	**450.000.000**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	30.000.000	30.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	150.000.000	150.000.000	Tanjungpinang		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	2	100.000.000	100.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	1	170.000.000	170.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11.954.260.427**	**11.954.260.427**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	804	11.374.048.427	11.374.048.427	Tanjungpinang		
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	1	580.212.000	580.212.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**71.750.000**	**71.750.000**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	1	71.750.000	71.750.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**82.600.000**	**82.600.000**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	pkt	1	57.600.000	57.600.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	5	25.000.000	25.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**842.204.000**	**842.204.000**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	1	15.000.000	15.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt	1	32.000.000	32.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	1	60.000.000	60.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	1	74.900.000	74.900.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lap	1	6.000.000	6.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	1	654.304.000	654.304.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**180.000.000**	**180.000.000**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	85.000.000	85.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt	1	25.000.000	25.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8	70.000.000	70.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**181.500.000**	**181.500.000**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	30.000.000	30.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	1	115.000.000	115.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	1	36.500.000	36.500.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**237.950.000**	**237.950.000**	**Tanjungpinang**	**Dinas Sosial**	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	4	162.950.000	162.950.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	44	30.000.000	30.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	45.000.000	45.000.000	Tanjungpinang		
	UPTD SOSIAL				**1.462.150.440**	**1.552.150.440**			
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**%**	**100,00**	**975.383.480**	**1.065.383.480**	**Prov. Kepri**	**UPTD SOSIAL**	**Pemenuhan SPM Bidang Sosial**
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**%**	**100,00**					

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**				**215.383.480**	**215.383.480**	**Tanjungpinang**	**UPTD SOSIAL**	**Pemenuhan SPM Bidang Sosial**
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	10	15.000.000	15.000.000	Tanjungpinang		
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	10	160.383.480	160.383.480	Tanjungpinang		
1.06.04.1.02.15	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	10	40.000.000	40.000.000	Tanjungpinang		
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**				**760.000.000**	**850.000.000**	**Batam**	**UPTD SOSIAL**	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	600	750.000.000	750.000.000	Batam		
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	org		-	90.000.000	Batam		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.1.05.18	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	org	2	10.000.000	10.000.000	Batam		
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**83,43**	**486.766.960**	**486.766.960**	**Tanjungpinang**	**UPTD SOSIAL**	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**88.383.480**	**88.383.480**	**Tanjungpinang**	**UPTD SOSIAL**	
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	1	88.383.480	88.383.480	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**130.000.000**	**130.000.000**	**Tanjungpinang**	**UPTD SOSIAL**	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	1	10.000.000	10.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt	1	15.000.000	15.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	1	20.000.000	20.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lap	1	15.000.000	15.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	1	70.000.000	70.000.000	Tanjungpinang		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2027	PRAKIRAAN MAJU (2028)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**45.000.000**	**45.000.000**	**Tanjungpinang**	**UPTD SOSIAL**	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt	1	30.000.000	30.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	15.000.000	15.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**223.383.480**	**223.383.480**	**Tanjungpinang**	**UPTD SOSIAL**	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	5.000.000	5.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	1	20.000.000	20.000.000	Tanjungpinang		
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	1	198.383.480	198.383.480	Tanjungpinang		
					20.000.000.000	**23.000.000.000**			

B. Usulan Masyarakat :

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Yayasan Lentera Hati Gurindam	Permohonan Bantuan Dana Kesekretariatan dan Kegiatan Peningkatan Wawasan Anak	Tanjungpinang	489.250.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
2.	Yayasan Badan Kerjasama Pelayanan Kasih (BKPK)	Permohonan Dana Yayasan Badan Kerjasama Pelayanan Kasih (BKPK)	Tanjungpinang	700.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
3.	Kelompok Usaha Bersama (Kub) "Bengkel Las Zaky Tralis"	Permohonan Bantuan Kendaraan Roda Empat (Pick up)	Tanjungpinang	190.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
4.	Dra. HJ. Dewi Kumalasari, M.Pd	Permohonan bantuan untuk anak-anak yatim	Batam	92.000.000	Penyediaan Permakanan	
5.	Yayasan Kreasi Nirwana Mandiri	Permohonan bantuan Bansos dan Kegiatan Usaha	Bintan	965.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
6.	Yayasan Gurindam Madani	Permohonan bantuan Kegiatan Usaha	Bintan	250.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
7.	Yayasan Pilar Sosial Berazam	Permohonan Bantuan Dana Hibah	Karimun	347.100.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	

C. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

(terlampir sebagaimana yang telah diinput pada SIPD)

LAMPIRAN II : Usulan yang Belum Dapat Diakomodir

No	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Lokasi	Alasan Ditolak
1					

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Burhanuddin, S.Hut., M.H.	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Burhanuddin, S.Hut., M.H.)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Burhanuddin, S.Hut., M.H.	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Burhanuddin, S.Hut., M.H.)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : https://barenlitbang.kepriprov.go.id

RUMUSAN DESK KELOMPOK MUSRENBANG
KELOMPOK I
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan pembahasan desk kelompok Musrenbang, dengan hasil sebagai berikut:

I. OPD Provinsi : **Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk**
II. Tim Pembahas : Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Nama	Jabatan	Instansi / Lembaga
1.	Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si	Perencana Ahli Utama (Pimpinan Desk)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Burhanuddin, S.Hut., M.H.	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
4.	Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga

III. Hasil Pembahasan/Kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyepakati Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang dapat diakomodir dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Menyepakati Permasalahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

IV. Rencana tindak lanjut hasil pembahasan dan klarifikasi :

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja disertai dengan Target, Lokasi dan Kebutuhan Pendanaan pada Rancangan Renja sebagaimana tercantum pada lampiran ini selanjutnya diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Rancangan Renja hasil Musrenbang Provinsi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

Demikian rumusan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Pimpinan Desk, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI,

Perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov. Kepri	Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(Nur Aisyah Fatmasari, SE, MM)	(Burhanuddin, S.Hut., M.H.)

MENGETAHUI,

Pimpinan Desk	Perwakilan Peserta
(Dr.H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si)	(Bob Edwin Normande, S.Si., M.S.P)

LAMPIRAN I
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2027

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif 2027	Prakiraan Maju (2028)	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.08.2.14.0.00.08.000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PROVINSI KEPULAUAN RIAU**				**23.816.145.635,60**	**24.097.071.659,60**			
2.08.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**23.006.145.635,60**	**23.217.071.659,60**			
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**Indeks**	**77,30**	**19.683.146.235,60**	**19.714.072.259,60**			
		Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk dan KB	**Nilai**	**BB**					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Dinas)	**Indeks**	**77,00**					
2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**260.000.000,00**	**260.000.000,00**			
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	100.000.000,00	100.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	80.000.000,00	80.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	80.000.000,00	80.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**12.778.543.249,60**	**12.778.543.249,60**			
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1080	11.806.508.794,60	11.806.508.794,60	Tanjungpinang		
2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	967.034.455,00	967.034.455,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.000.000,00	5.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**70.000.000,00**	**70.000.000,00**			
2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	70.000.000,00	70.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**180.000.000,00**	**180.000.000,00**			
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	60.000.000,00	0,00	Tanjungpinang		

2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	84	120.000.000,00	180.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**750.000.000,00**	**750.000.000,00**			
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000,00	35.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000,00	30.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	60.000.000,00	60.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	120.000.000,00	120.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	100.000.000,00	100.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	10.000.000,00	10.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	20.000.000,00	20.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	375.000.000,00	375.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**4.499.602.986,00**	**4.549.129.010,00**			
2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	25.000.000,00	23.600.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	50.000.000,00	50.000.000,00	Tanjungpinang		
	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	1	20.000.000,00				2134516
2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.424.602.986,00	4.475.529.010,00	Tanjungpinang		
	Revitalisasi Gedung UPTD PPA danPengadaan sarana dan prasarana di Kabupaten Natuna		Paket	1	1.500.000.000,00		Kabupaten Natuna		Usulan Kabupaten Natuna
	Pembangunan Gedung Kantor Rumah Aman Perempuan Dan Anak / Shelter di Kabupaten Kepulauan Anambas		Paket	1	1.500.000.000,00		Kabupaten Kepulauan Anambas		Usulan Kabupaten Kepulauan Anambas
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**775.000.000,00**	**756.400.000,00**			
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	200.000.000,00	200.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	68.600.000,00	50.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	506.400.000,00	506.400.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**370.000.000,00**	**370.000.000,00**			

2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	170.000.000,00	170.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000,00	10.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	120.000.000,00	120.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	70.000.000,00	70.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD**	**%**	**13,05**	**1.470.000.000,00**	**1.505.000.000,00**		**Prioritas Daerah**	**Prioritas Daerah**
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	**%**	**54,50**					
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**				**125.000.000,00**	**150.000.000,00**			
2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Lembaga	10	50.000.000,00	50.000.000,00	Tanjungpinang		Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.02.1.01.0014	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	Orang	30	50.000.000,00	50.000.000,00	Tanjungpinang		Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.02.1.01.0016	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi	Kebijakan	1	25.000.000,00	50.000.000,00	Tanjungpinang		
2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**				**1.080.000.000,00**	**1.080.000.000,00**			
2.08.02.1.02.0010	Advokasi Dan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan/Atau Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	29	500.000.000,00	500.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Kegiatan	1	100.000.000,00				2134695
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Kegiatan	1	100.000.000,00				2169159
	Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Kewirausahaan Bagi Perempuan di Kota Tanjungpinang		O/K	25	300.000.000,00		Kota Tanjungpinang		Usulan Pemerintah Kota Tanjungpinang
2.08.02.1.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	Orang	180	550.000.000,00	550.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD

	Pelatiahan Rias Pengantin		Kegiatan	1	50.000.000,00		Bintan		2035000
	Kegiatan Seminar Pemberdayaan Perempuan (Perempuan Melek Finansial Dan Kesehatan Mental)		Kegiatan	1	50.000.000,00		Batam		2217230
	Pengadaan dan Pelatihan Menenun Kain Songket Lingga Menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)		Kegiatan	1	50.000.000,00		Lingga		1926484
	Kegiatan Life Skill Bagi Perempuan (Menjahit, Memasak)		Kegiatan	1	50.000.000,00		Batam		2134429
	Pelatihan Public Speaknig		Kegiatan	1	50.000.000,00		Batam		2157540
	Pengadaan Pelatihan untuk meningkatkan ekonomi Keluarga		Kegiatan	1	50.000.000,00		Batam		2169833
	Kegiatan Pelatihan Karakter Dan Pembinaan Rohani Bagi Kaum Perempuan		Kegiatan	1	50.000.000,00		Batam		2217149
	Mendidik Para ibu ibu dan Remaja untuk memiliki skill menjahit		Kegiatan	1	50.000.000,00				2125140
	Pengadaan Pelatihan Untuk Meningkat kan ekonomi Keluarga		Kegiatan	1	50.000.000,00		Batam		2035153
2.08.02.1.02.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Laporan	1	30.000.000,00	30.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
	Kunjungan Lapangan Perempuan Politik ke Luar Daerah		Kegiatan	1	10.000.000,00				2134664
2.08.02.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**				**265.000.000,00**	**275.000.000,00**			
2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	4	90.000.000,00	100.000.000,00			
2.08.02.1.03.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	Orang	30	150.000.000,00	150.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD

2.08.02.1.03.0013	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Laporan	1	25.000.000,00	25.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO**	**Rasio**	**42,31**	**250.852.100,00**	**295.852.100,00**			**Asta Cita Prioritas Daerah**
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**150.852.100,00**	**120.852.100,00**			
2.08.03.1.01.0008	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi	Kegiatan	1	50.000.000,00	0,00			Asta Cita Rakortek ProsSN/Mandatory Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.01.0010	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	Orang	20	50.852.100,00	50.852.100,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000,00	70.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**				**100.000.000,00**	**175.000.000,00**			

2.08.03.1.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Dokumen	1	50.000.000,00	55.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.03.0013	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	Orang	30	50.000.000,00	120.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)**	**Nilai**	**72,70**	**280.000.000,00**	**295.000.000,00**			**Asta Cita**
2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**				**50.000.000,00**	**50.000.000,00**			
2.08.04.1.01.0005	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	1	25.000.000,00	50.000.000,00			
2.08.04.1.01.0006	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kebijakan	1	25.000.000,00	0,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD Usulan Bidang
2.08.04.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**				**100.000.000,00**	**100.000.000,00**			
2.08.04.1.02.0007	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	7	100.000.000,00	100.000.000,00			
2.08.04.1.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**130.000.000,00**	**145.000.000,00**			

2.08.04.1.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	20.000.000,00	22.000.000,00			
2.08.04.1.03.0004	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	40	40.000.000,00	45.000.000,00			Usulan Pokir
	Permohonan Penyediaan layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam mewujudkan KG dan PA		Kegiatan	1	20.000.000,00				2109199
2.08.04.1.03.0005	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	500	50.000.000,00	55.000.000,00			
	Pelatihan Konselor PUSPAGA di Kota Tanjungpinang		O/K	2	20.000.000,00		Kota Tanjungpinang		Usulan Pemerintah Kota Tanjungpinang
2.08.04.1.03.0006	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	20.000.000,00	23.000.000,00			
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan**	**%**	**60,46**	**20.000.000,00**	**30.000.000,00**			**Asta Cita**
2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**				**20.000.000,00**	**30.000.000,00**			
2.08.05.1.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Lembaga	1	10.000.000,00	15.000.000,00			

2.08.05.1.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	10.000.000,00	15.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Tingkat Madya**	**%**	**85,71**	**220.000.000,00**	**265.000.000,00**			**Asta Cita**
2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**				**170.000.000,00**	**195.000.000,00**			
2.08.06.1.01.0009	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	4	70.000.000,00	80.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.06.1.01.0010	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	Orang	50	100.000.000,00	115.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
	Kegiatan Seminar Pembekalan menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi remaja usia SMA/SMK		Kegiatan	1	15.000.000,00				2217288
	Kegiatan Seminar Pembinaan Siswa SMA/SMK Tentang Bahaya Media Sosial		Kegiatan	1	15.000.000,00				2217297
	Kegiatan Pelatihan Konselor Teman Sebaya Berbasis Client Centered Counseling bagi siswa SMA/SMK		Kegiatan	1	15.000.000,00				2217250
	Kegiatan Pelatihan Pelatihan Literasi Digital bagi remaja usia SMP dan SMA		Kegiatan	1	15.000.000,00				2217282
	Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan bagi siswa SMA/SMK		Kegiatan	1	15.000.000,00				2217271
	Pelatihan Fasilitator PATBM di Kota Tanjungpinang		O/K	2	20.000.000,00		Kota Tanjungpinang		Usulan Pemerintah Kota Tanjung
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**				**50.000.000,00**	**70.000.000,00**			

2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	50	50.000.000,00	70.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.07	**PPOGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA)**	**Rasio Kekerasan Terhadap Anak**	**Rasio**	**5,79**	**270.507.900,00**	**290.507.900,00**			**Asta Cita Prioritas Daerah**
2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**201.147.900,00**	**221.147.900,00**			
2.08.07.1.01.0011	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	Kegiatan	1	51.147.900,00	51.147.900,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
	Permohonan Bantuan Dana Sosialisasi Program Perlindungan Khusus Anak				20.000.000,00		Batam		PT. Batam Multimedia Televisi
2.08.07.1.01.0015	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	Orang	30	150.000.000,00	170.000.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.07.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**69.360.000,00**	**69.360.000,00**			
2.08.07.1.03.0017	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	30	69.360.000,00	69.360.000,00			Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**810.000.000,00**	**880.000.000,00**			
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)**	**Nilai**	**70**	**50.000.000,00**	**70.000.000,00**			
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19)	**%**	**10,2**					

2.14.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**				**50.000.000,00**	**70.000.000,00**			
2.14.02.1.01.0018	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	50.000.000,00	70.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)**	**%**	**10,75**	**160.000.000,00**	**220.000.000,00**			**Asta Cita**
		Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	**%**	**84,19**					
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	**%**	**59,7**					
2.14.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**110.000.000,00**	**150.000.000,00**			
2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	Daerah	3	60.000.000,00	80.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya L okal yang dikembangkan/disediakan.	Dokumen	1	50.000.000,00	70.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	
2.14.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				**50.000.000,00**	**70.000.000,00**			
2.14.03.1.01.0013	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	Dokumen	1	50.000.000,00	70.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Nilai	69,00	600.000.000,00	590.000.000,00			Asta Cita
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	36,11					
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				500.000.000,00	450.000.000,00			
2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	20	50.000.000,00	50.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kelompok	5	50.000.000,00	50.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	
2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Daerah	1	200.000.000,00	200.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	
2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Laporan	1	200.000.000,00	150.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	
	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil, Menyusui serta Balita		Kegiatan	1	30.000.000,00				2217271
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				100.000.000,00	140.000.000,00			
2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/ Kota	3	50.000.000,00	70.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	
2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	20	50.000.000,00	70.000.000,00		Bidang DALDUK & KB	
2.08.2.14.0.00.08.0001	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				811.639.400,00	821.639.400,00			
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang Mendapakan Layanan	%	97	178.319.400,00	178.319.400,00			Asta Cita Prioritas

	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%						Daerah
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan KoordinasiTingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**178.319.400,00**	**178.319.400,00**			
2.08.03.1.02.0011	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5	795.000,00	795.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.02.0012	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	5	10.000.000,00	10.000.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	20	20.000.000,00	20.000.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.02.0014	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	15	10.175.000,00	10.175.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	3.373.200,00	3.373.200,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.02.0016	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	35	20.923.000,00	20.923.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.03.1.02.0017	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	17.500.000,00	17.500.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD

2.08.03.1.02.0018	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	45	95.553.200,00	95.553.200,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.07	**PPOGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA)**	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapakan layanan komprehensif**	**%**	**97**	**118.320.000,00**	**118.320.000,00**			**Asta Cita Prioritas Daerah**
2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**				**118.320.000,00**	**118.320.000,00**			
2.08.07.1.02.0016	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2	1.326.000,00	1.326.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.07.1.02.0017	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	15	40.000.000,00	40.000.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Rakortek ProSN Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.07.1.02.0018	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	9.482.700,00	9.482.700,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.07.1.02.0019	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	22.355.000,00	22.355.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuklahiran SIPD
2.08.07.1.02.0020	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	8	1.782.700,00	1.782.700,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.07.1.02.0021	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	3	1.848.000,00	1.848.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.07.1.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	25	20.141.600,00	20.141.600,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD
2.08.07.1.02.0023	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	25	21.384.000,00	21.384.000,00	7 Kab/Kota	UPTD PPA Kepri	Sub Kegiatan Pemuktahiran SIPD

2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (UPTD PPA)**	**Indeks**	**93,55**	**515.000.000,00**	**525.000.000,00**			
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**105.000.000,00**	**105.000.000,00**			
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000,00	5.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.000.000,00	20.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000,00	20.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	30.000.000,00	30.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	5.000.000,00	5.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	25.000.000,00	25.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**190.000.000,00**	**200.000.000,00**			
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	140.000.000,00	150.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000,00	50.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**220.000.000,00**	**220.000.000,00**			
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	120.000.000,00	120.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	30.000.000,00	30.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	70.000.000,00	70.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD PPA Kepri	

LAMPIRAN I B. USULAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2027

No	Pengusul	Uraian	Lokasi	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Yayasan KITA PERKATA Indonesia Rini Lisbet Sitio, S.E., M.M Alamat : Kavling Nato Permata Blok D4 No.48, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau HP. 081275425541	Permohonan Bantuan Dana Seminar Perempuan Melek Finansial dan Kesehatan Mental	Kota Batam	Rp 233.060.000	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Catatan Har : Didalam Proposal dimana kegiatan yang dilaksanakan pada April 2026 serta untuk uraian masalah sudah ada di SIPD E Pokir No. ID Usulan 2217230 atas Nama Pak Onward Siahaan dengan status disetujui dalam bentuk kegiatan
2	Yayasan Gelora Madani Batam Fendi Hidayat, S.T., M.Kom Alamat : Villa Pesona Asri Blok A6 No. 7 RT 003/RW 10 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota HP. 082387873069	Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pelatihan Konselor Sebaya Berbasis Client Centered Counseling	Kota Batam	Rp 532.980.000	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Catatan Har : Untuk Uraian Proposal dan Alamat sudah ada di SIPD E Pokir No. ID Usulan 2217250 atas Nama Pak Onward Siahaan dengan status disetujui dalam bentuk kegiatan
3	Yayasan Siloam Nusantara Suarman Lase Alamat : Jl Jawa No. 31 Bengkong Tengah RT 02/ RW 08 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam HP. 081376970980	Permohonan Bantuan Dana Seminar Pembinaan Anak Sekolah Tentang Bahaya Media Sosial	Kota Batam	Rp 511.250.000	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Catatan Har : Untuk Uraian Proposal dan Alamat sudah ada di SIPD E Pokir No. ID Usulan 2217297 atas Nama Pak Onward Siahaan dengan status disetujui dalam bentuk kegiatan

4	PT. Batam Multimedia Televisi Dr. Rini Elfina, S.E., M.Si Alamat : Graha Pena Batam Lt. 9, Jl. Raya Batam Center Kota Batam HP. 085265071977	Permohonan Bantuan Dana Sosialisasi Program Perlindungan Khusus Anak	Kota Batam	Rp	400.000.000	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Catatan Har : Terkait usulan ini hanya melampirkan Surat Permohonan Gubernur dan CV yang belum ada yakni proposal dan data dukung lainnya

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	1926464	23-02-2026	MUHAMMAD NAJIB	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Pengadaan dan Pelatihan Menenun Kain Songket Lingga Menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	KEL. DABO LAMA KEC. SINGKEP, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan disetujui guna meningkatkan SDM Pemberdayaan Perempuan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	PAKET	400.000.000,00	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
2	2035000	05-03-2026	Dra. HJ. DEWI KUMALASARI, M.Pd	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan	Pelatiahan Rias Pengantin	Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	usulan ini diteruskan kepada perangkat daerah	Usulan disetujui guna meningkatkan SDM Pemberdayaan Perempuan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	300.000.000,00	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
3	2035153	05-03-2026	AMAN, S.Pd , MM	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan	Pengadaan Pelatihan Untuk Meningkatkan ekonomi Keluarga	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir ini dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan proposal atau data pendukung	Usulan ini diterima guna mendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	350	Orang	400.000.000,00	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
4	2043904	05-03-2026	DRS. KHAZALIK	Belum optimal kegiatan Fasiilitasi kepada seniman,pelaku budaya dalam mengembangkan kompetensi dan kreativitas dalam pemajuan kebudayaan	Bantuan Pembuatan Tenda Untuk Kegiatan Masyarakat (Persatuan Batak Bersatu)	Bintan Utara , Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Kebudayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dikembalikan	Terkait Usulan Proposal Ini Tidak mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	-	-	1	Paket	-	-	-
5	2046520	06-03-2026	Dra. HJ. DEWI KUMALASARI, M.Pd	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakata	Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik	Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dikembalikan	Usulan Pokir ini dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan proposal atau data pendukung	OK	Usulan Pokir ini dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan proposal atau data pendukung	-	-	1	Paket	-	-	-

6	2046794	06-03-2026	Dra. HJ. DEWI KUMALASARI, M.Pd	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakata	Pelatihan Memasak /Boga	Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dikembalikan	Usulan Pokir ini dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan proposal atau data pendukung	OK	Usulan Pokir ini dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan proposal atau data pendukung	-	-	1	Paket	-	-	-
7	2076680	09-03-2026	Dra. HJ. DEWI KUMALASARI, M.Pd	Belum Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil, Menyusui serta Balita	Kecamatan Bintan Pesisir Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan ini diteruskan kepada perangkat daerah	Usulan Diterima Guna Mendukung Program Nasional terkait Penurunan Prevalensi Stunting	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	300.000.000,00	-	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
8	2109199	12-03-2026	Hj. ISMIYATI, S.Pd.AUD	Belum optimalnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Permohonan Penyediaan layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam mewujudkan KG dan PA	Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Guna Mendukung Pelayanan Keluarga dan Anak PUSPAGA Bagi Masyarakat di Provinsi KepulauanRiau	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	200.000.000,00	-	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9	2109240	12-03-2026	Hj. ISMIYATI, S.Pd.AUD	Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Permohonan Penerbitan Peraturan Gubernur tentang ketahanan keluarga	Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dikembalikan	usulan ini dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan proposal atau data pendukung	OK	usulan ini dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan proposal atau data pendukung	-	-	1	Paket	-	Non Belanja Transfer	-
10	2121430	13-03-2026	Hj. MESRAWATI TAMPUBOLON, SE., MH	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Pelatihan Tata Rias	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dikembalikan	usulan ini dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan proposal atau data pendukung	OK	usulan ini dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan proposal atau data pendukung	-	-	1	Paket	-	Non Belanja Transfer	-
11	2124160	14-03-2026	dr. H. JUZRIZAL	Perlunya Tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan adalah jumlah calon pekerja yang telah mendapatkan pelatihan dan mendapat pekerjaan serta jumlah peserta pemagangan	Permohonan Bantuan Proposal Program Kecakapan Kerja melalui Pelatihan otomatisasi tata kelola perkantoran untuk anak putus sekolah dan tidak melanjutkan serta keluarga kurang mampu	Komplek Ruko Telaga Mas, Jl. Jenderal Ahmad Yani Barat No.2 Blok B, RW2 Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Verifikasi Perangkat Daerah	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah	-	-	1	Paket	-	-	-

12	2124893	14-03-2026	dr. H. JUZRIZAL	Belum optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Kualitas Diri dan Pengembangan Ekonomi Keluarga	PKBM Karimun Pertiwi, JL. A.Yani. Komp Ruko Telaga Mas Blok B No.1, Kolong Sei Lakam Barat, Kec.Karimun, Prop.Kepri, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Validasi Mitra Bappeda	-	OK	Usulan ini belum dapat diteruskan karena belum terdapat surat proposal dan data pendukung	-	-	200000000	Rp	-	-	-
13	2125140	14-03-2026	dr. H. JUZRIZAL	Belum optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Mendidik Para ibu ibu dan Remaja untuk memiliki skill menjahit	LSM Sriknadi, JL.Komp.Ruko Telaga Mas Blok B No.1, Kolong, Kec. Sei Lakam Barat, Kab.Karimun, Prop.Kepri, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan ini diterima guna mendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	300.000.000,00	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
14	2134429	15-03-2026	RIRIN WARSITI, SE., MM	Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Kegiatan Life Skill Bagi Perempuan (Menjahit, Memasak)	Provinsi Kepri, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah	Usulan ini Diterima untuk mendukung Pemberdayaan Perempuan dan meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	300.000.000,00	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
15	2134516	15-03-2026	RIRIN WARSITI, SE., MM	Belum Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepri, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah	Usulan ini Diterima untuk Mendukung Kelengkapan SARPRAS dalam meningkatan Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	300.000.000,00	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16	2134664	15-03-2026	RIRIN WARSITI, SE., MM	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan	Kunjungan Lapangan Perempuan Politik ke Luar Daerah	Provinsi Kepri, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah	Usulan ini diterima guna mendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	300.000.000,00	-	Perrantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi

17	2134696	15-03-2026	RIRIN WARSITI, SE., MM	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah	Usulan ini diterima guna mendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	300.000.000,00	-	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi
18	2157540	17-03-2026	Hj. MESRAWATI TAMPUBOLON, SE., MH	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan	Pelatihan Public Speaknig	Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah	Usulan ini diterima guna mendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	300.000.000,00	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
19	2159572	18-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan	Hibah Uang ke Yayasan Kita Perkata Indonesia untuk Kegiatan Advokasi Perempuan	Kav. Nato Permata Blok D4 No. 48, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dikembalikan	usulan ini dikembalikan karena narasi permasalahan masih bersifat hibah	OK	usulan ini dikembalikan karena narasi permasalahan masih bersifat hibah	-	-	1	Is	-	Non Belanja Transfer	-
20	2159583	18-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Hibah Uang Yayasan Gelora Madani Batam untuk Kegiatan Pelatihan Konselor Sebaya	Perumahan Villa Pesona Asri Blok A5 No 07, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dikembalikan	usulan ini dikembalikan karena narasi permasalahan masih bersifat hibah	OK	usulan ini dikembalikan karena narasi permasalahan masih bersifat hibah	-	-	1	Is	-	Non Belanja Transfer	-
21	2159589	18-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Hibah Uang ke Yayasan Siloam Nusantara Untuk Kegiatan Seminar Pembinaan Anak Sekolah Tentang Bahaya Media Sosial	Jalan Jawa No 31 Bengkong Tengah, RT 02 RW 08, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dikembalikan	usulan ini dikembalikan karena narasi permasalahan masih bersifat hibah	OK	usulan ini dikembalikan karena narasi permasalahan masih bersifat hibah	-	-	1	Is	-	Non Belanja Transfer	-

22	2169159	19-03-2026	H. IMAN SUTIAWAN, SE	Belum optimalnya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	IKKD Prov Kepri, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah	Usulan ini diterima guna mendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	300.000.000,00	-	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi
23	2169833	19-03-2026	AMAN, S.Pd., MM	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan	Pengadaan Pelatihan untuk meningkatkan ekonomi Keluarga	Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan ini diterima guna mendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	350	Orang	500.000.000,00	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
24	2217149	29-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan	Kegiatan Pelatihan Karakter Dan Pembinaan Rohani Bagi Kaum Perempuan	Ruko Mega Legenda Extension Blok F1 No. 06, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan ini diterima guna mendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Is	200.000.000,00	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
25	2217230	29-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan	Kegiatan Seminar Pemberdayaan Perempuan (Perempuan Melek Finansial Dan Kesehatan Mental)	Kav. Nato Permata Blok D4 No. 48, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan ini diterima guna mendukung Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Is	200.000.000,00	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
26	2217250	29-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan Pelatihan Konselor Teman Sebaya Berbasis Client Centered Counseling bagi siswa SMA/SMK	Komp Ruko Pondok Idaman Blok A2 No 7, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan ini diterima untuk mendukung pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Is	200.000.000,00	-	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

27	2217271	29-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan bagi siswa SMA/SMK	Taman Kurnia Djaja Alam Jl. Cendrawasih 3 No. 20, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan ini diterima untuk mendukung pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Is	200.000.000,00	-	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
28	2217282	29-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan Pelatihan Pelatihan Literasi Digital bagi remaja usia SMP dan SMA	Perumahan Villa Pesona Asri Blok A5 No 07, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan ini diterima untuk mendukung pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Is	200.000.000,00	-	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
29	2217288	29-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan Seminar Pembekalan menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi remaja usia SMA/SMK	Jalan Raya Batuaji Baru Kav. Nato Blok A3 No. 05, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan ini diterima untuk mendukung pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Is	200.000.000,00	-	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
30	2217297	29-03-2026	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH., M.Hum	Belum Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan Seminar Pembinaan Siswa SMA/SMK Tentang Bahaya Media Sosial	Jalan Jawa No 31 Bengkong Tengah, RT 02 RW 08, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	-	OK	Usulan Pokir DPRD diteruskan kepada perangkat daerah dengan sudah memperhatikan kewenangan untuk selanjutnya di terjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah Tahun 2027	Usulan ini diterima untuk mendukung pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	Disetujui, sudah diverifikasi Perangkat Daerah	1	Is	200.000.000,00	-	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi